

## Resolusi Kewargaan dalam Konflik Horizontal Studi Kualitatif tentang Dinamika Sosial Masyarakat di Jawa Tengah

Fitriani<sup>1</sup>

Universitas Diponegoro

Korespondensi Email : fitriani@undip.ac.id

### **Abstract**

*This article examines citizenship practices in the management of horizontal conflict in Central Java. The study is based on the argument that horizontal conflict is not merely a social disturbance between community groups, but also a citizenship challenge concerning coexistence, mutual recognition, participation, and civic responsibility. Using a descriptive qualitative approach, this research analyzes how local communities, informal leaders, youth groups, and neighborhood institutions respond to tension, prevent escalation, and rebuild social trust after conflict. The study involved 16 informants consisting of community leaders, youth representatives, religious figures, neighborhood administrators, and residents in a conflict-prone area in Central Java. Data were collected through interviews, observation, and document review. Based on the findings, the article identifies three major patterns. First, horizontal conflict often emerges from accumulated distrust, communication breakdown, and competition over local influence rather than from a single immediate trigger. Second, citizenship practices become crucial when local actors create dialogue, mediation, and joint community activities that transform antagonism into cooperation. Third, the sustainability of peace remains dependent on social trust, inclusive local leadership, and the presence of institutions capable of maintaining communication across groups. In this context, the article argues that citizenship is not only tested during elections or formal political processes, but also in the everyday capacity of citizens to manage difference without violence. Accordingly, strengthening citizenship in conflict-prone communities requires civic education, participatory mediation mechanisms, and durable local collaboration.*

**Keywords:** *citizenship; horizontal conflict; social cohesion; conflict resolution; Central Java*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji praktik kewargaan dalam pengelolaan konflik horizontal di Jawa Tengah. Kajian ini berangkat dari argumen bahwa konflik horizontal bukan sekadar gangguan sosial antarkelompok masyarakat, melainkan juga tantangan kewargaan yang berkaitan dengan hidup bersama, saling pengakuan, partisipasi, dan tanggung jawab sipil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis bagaimana masyarakat lokal, tokoh informal, kelompok pemuda, dan kelembagaan lingkungan merespons ketegangan, mencegah eskalasi, serta membangun kembali kepercayaan sosial setelah konflik. Penelitian ini melibatkan 16 informan yang terdiri atas tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, tokoh agama, pengurus lingkungan, dan warga di wilayah yang rentan terhadap konflik sosial di Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan temuan, artikel ini mengidentifikasi tiga pola utama. Pertama, konflik horizontal sering muncul

dari akumulasi ketidakpercayaan, putusnya komunikasi, dan kompetisi pengaruh lokal, bukan semata karena satu pemicu langsung. Kedua, praktik kewargaan menjadi sangat penting ketika aktor lokal membangun dialog, mediasi, dan kegiatan bersama yang mengubah antagonisme menjadi kerja sama. Ketiga, keberlanjutan perdamaian sangat bergantung pada kepercayaan sosial, kepemimpinan lokal yang inklusif, dan keberadaan institusi yang mampu menjaga komunikasi antarkelompok. Dalam konteks ini, artikel menegaskan bahwa kewargaan tidak hanya diuji dalam pemilu atau proses politik formal, tetapi juga dalam kapasitas warga sehari-hari untuk mengelola perbedaan tanpa kekerasan. Dengan demikian, penguatan kewargaan di wilayah rentan konflik memerlukan pendidikan kewargaan, mekanisme mediasi partisipatif, dan kolaborasi lokal yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** kewargaan; konflik horizontal; kohesi sosial; resolusi konflik; Jawa Tengah

## **Pendahuluan**

Kewargaan pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan status formal seseorang sebagai anggota negara, tetapi juga dengan kapasitas warga untuk hidup bersama, mengelola perbedaan, dan menjaga kepentingan umum dalam ruang sosial yang majemuk (Marshall, 1950). Dalam masyarakat yang plural, kualitas kewargaan dapat diuji bukan hanya dalam momen-momen politik resmi, tetapi juga dalam situasi konflik sosial sehari-hari. Based on perspektif ini, konflik horizontal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai benturan spontan antarwarga, melainkan sebagai cerminan dari relasi kewargaan yang sedang mengalami gangguan. Ketika komunikasi memburuk, prasangka meningkat, dan mekanisme penyelesaian bersama melemah, maka konflik mudah berkembang menjadi ketegangan yang merusak kohesi sosial. Dengan demikian, studi tentang konflik horizontal sangat relevan bagi kajian citizenship karena memperlihatkan bagaimana warga menghadapi perbedaan, ketidakpercayaan, dan persaingan dalam kehidupan bersama.

Konflik horizontal sering muncul dalam konteks lokal yang tampak biasa, seperti kesalahpahaman antarwarga, persaingan antarkelompok pemuda, perbedaan kepentingan sosial, sengketa penggunaan ruang, atau ketegangan identitas di tingkat komunitas. Namun, konflik semacam itu jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial pada umumnya tumbuh dari akumulasi ketegangan, ketimpangan relasi, lemahnya komunikasi, serta absennya institusi mediasi yang dipercaya bersama (Coser, 1956; Gurr, 1970). Dalam konteks ini, peristiwa pemicu sering kali hanya menjadi titik ledak dari persoalan yang telah lama tersimpan. Thus, konflik horizontal perlu dibaca sebagai proses sosial yang kompleks, bukan semata insiden permukaan.

Di wilayah Jawa Tengah, masyarakat lokal dikenal memiliki tradisi kebersamaan, musyawarah, dan struktur komunitas yang relatif kuat. On the other hand, perubahan sosial, mobilitas penduduk, kompetisi ekonomi, pengaruh media sosial, serta fragmentasi komunikasi lokal dapat melemahkan ikatan sosial yang sebelumnya stabil. Dalam situasi seperti itu, relasi antarwarga menjadi lebih rentan terhadap

kesalahpahaman, provokasi, dan polarisasi. In this context, konflik horizontal menjadi isu penting karena dapat muncul di tengah lingkungan yang secara formal tampak harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan kerentanan dalam relasi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, memahami dinamika konflik horizontal di Jawa Tengah penting untuk membaca bagaimana kewargaan dipraktikkan dalam kondisi sosial yang penuh tekanan. Kajian citizenship memberikan landasan yang kuat untuk membaca konflik horizontal sebagai persoalan hidup bersama. Isin dan Nielsen (2008) menekankan bahwa kewargaan tidak hanya terkait hak dan kewajiban formal, tetapi juga tindakan-tindakan warga dalam mengklaim, merespons, dan membentuk ruang publik. Dalam situasi konflik, tindakan kewargaan dapat muncul dalam bentuk mediasi, penolakan terhadap kekerasan, perlindungan terhadap kelompok rentan, atau inisiatif membangun kembali komunikasi antarwarga. Dengan kata lain, kewargaan bukan hanya mengenai partisipasi dalam sistem politik, melainkan juga mengenai kesediaan warga untuk menjaga kemungkinan hidup bersama ketika hubungan sosial sedang terganggu. Accordingly, resolusi konflik dapat dipahami sebagai praktik kewargaan yang konkret.

Perspektif ini juga sejalan dengan pemahaman tentang kohesi sosial. Kohesi sosial tidak hanya berarti adanya kedekatan emosional atau hubungan sosial yang akrab, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kepercayaan, norma bersama, dan mekanisme kerja sama di tengah perbedaan (Putnam, 2000; Chan et al., 2006). Ketika kohesi sosial melemah, ruang bagi konflik horizontal menjadi semakin besar. Sebaliknya, ketika warga memiliki kebiasaan dialog, saling mengenal, dan ruang partisipasi kolektif, maka konflik lebih mudah dicegah atau diredam. Based on argumen ini, kajian konflik horizontal harus memperhatikan bukan hanya faktor pemicu, tetapi juga kondisi kewargaan yang menopang atau melemahkan perdamaian lokal.

Dalam studi konflik, para ahli menekankan pentingnya mekanisme resolusi berbasis komunitas. Lederach (1997) menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian formal, tetapi juga oleh transformasi relasi sosial di tingkat akar rumput. Hal ini sangat relevan dalam konflik horizontal, karena aktor-aktor yang paling dekat dengan persoalan justru sering berasal dari masyarakat itu sendiri: tokoh agama, pemuda, pengurus lingkungan, tokoh adat, dan warga yang memiliki pengaruh sosial. Through keterlibatan aktor-aktor lokal ini, penyelesaian konflik dapat bergerak dari sekadar penghentian benturan menuju pemulihan kepercayaan dan rekonstruksi hubungan sosial. In this context, praktik kewargaan berperan sebagai jembatan antara perdamaian prosedural dan perdamaian sosial.

Namun demikian, pengelolaan konflik horizontal juga menghadapi tantangan besar. Tidak semua masyarakat memiliki kapasitas dialog yang memadai. Dalam beberapa kasus, prasangka antarkelompok, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, loyalitas sempit, dan ketidaknetralan elite lokal justru memperkuat polarisasi. On the other hand, ketika kepemimpinan lokal bersifat inklusif dan mekanisme komunikasi berjalan secara terbuka, potensi eskalasi dapat lebih cepat diredam. Dengan demikian,

kualitas kewargaan dalam konflik sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, distribusi kepercayaan, dan keterbukaan ruang komunikasi lokal.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik komunal di tingkat lokal sering kali lebih efektif dikelola melalui kombinasi antara mediasi sosial, komunikasi informal, dan penguatan kelembagaan lokal daripada sekadar pendekatan koersif dari luar (Varshney, 2002; Barron et al., 2009). Dalam konteks Indonesia, penyelesaian konflik horizontal juga banyak bergantung pada kemampuan aktor lokal membangun kembali rasa aman dan rasa memiliki bersama setelah ketegangan mereda. Namun, masih terbatas pembahasan yang secara khusus menempatkan konflik horizontal sebagai arena pembacaan citizenship, terutama di wilayah Jawa Tengah. Padahal, perspektif ini penting untuk melihat konflik bukan hanya sebagai gangguan keamanan, tetapi juga sebagai ujian terhadap kualitas hidup bersama warga.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana konflik horizontal berkembang dalam relasi sosial masyarakat lokal di Jawa Tengah, bagaimana praktik kewargaan berperan dalam meredam konflik tersebut, dan faktor apa yang menentukan keberlanjutan perdamaian setelah konflik? Berdasarkan pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal. Pertama, dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya konflik horizontal. Kedua, bentuk-bentuk praktik kewargaan yang digunakan masyarakat untuk mengelola konflik dan membangun rekonsiliasi. Ketiga, tantangan yang dihadapi dalam menjaga perdamaian sosial secara berkelanjutan. In this context, artikel ini berkontribusi pada kajian Journal of Citizenship dengan menunjukkan bahwa kewargaan di tingkat lokal tidak hanya terlihat dalam kepatuhan pada aturan atau partisipasi formal, tetapi juga dalam kemampuan warga menjaga ruang hidup bersama dari kekerasan, prasangka, dan perpecahan sosial.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji dinamika konflik horizontal dan praktik kewargaan dalam pengelolaannya di salah satu wilayah komunitas di Jawa Tengah yang memiliki kerentanan terhadap ketegangan sosial antarkelompok. Lokasi penelitian dipilih karena memperlihatkan adanya pengalaman konflik sosial di tingkat lokal yang melibatkan warga, kelompok pemuda, dan tokoh masyarakat, serta menunjukkan upaya penyelesaian melalui mekanisme komunitas. Sumber data penelitian terdiri atas 16 informan yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan pemuda, pengurus RT/RW, mediator lokal, dan warga yang pernah terlibat langsung maupun terdampak oleh konflik. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap interaksi sosial dan forum warga, serta telaah dokumen berupa catatan musyawarah, bahan mediasi komunitas, dan arsip lokal yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola penyebab konflik, bentuk-bentuk intervensi kewargaan, serta faktor penentu keberlanjutan perdamaian lokal

(Miles et al., 2014). Through proses ini, data dari berbagai kategori informan dibandingkan untuk melihat konsistensi narasi dan variasi pengalaman sosial terkait konflik. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan silang antar-informan agar interpretasi yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan ketepatan analitis yang memadai (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2014).

## **Hasil dan Diskusi**

### **1. Konflik Horizontal sebagai Akumulasi Ketegangan Sosial**

Temuan pertama menunjukkan bahwa konflik horizontal di wilayah penelitian tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui akumulasi ketegangan yang berlangsung dalam relasi sosial sehari-hari. Banyak informan menjelaskan bahwa konflik dipicu oleh hal-hal yang tampak kecil, seperti saling sindir, persaingan antar kelompok pemuda, kesalahpahaman dalam kegiatan warga, atau perbedaan cara pandang terhadap penggunaan ruang bersama. Akan tetapi, Based on penjelasan mereka, persoalan-persoalan tersebut sebenarnya telah menumpuk bersama rasa curiga, komunikasi yang memburuk, dan pengalaman ketidakadilan yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, peristiwa pemicu hanya mempercepat ledakan konflik yang telah dipersiapkan oleh relasi sosial yang rapuh. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa konflik sosial sering merupakan ekspresi dari ketegangan laten yang sebelumnya tidak tertangani secara memadai (Coser, 1956; Gurr, 1970).

Dalam konteks ini, ketidakpercayaan menjadi faktor yang sangat menentukan. Warga dari kelompok yang berbeda mulai menafsirkan tindakan pihak lain secara negatif, bahkan untuk hal-hal yang bersifat biasa. Komunikasi yang seharusnya dapat menjernihkan keadaan justru terputus atau hanya berlangsung di antara kelompok masing-masing. In this context, rumor dan informasi sepihak menjadi lebih mudah dipercaya daripada klarifikasi langsung. Kondisi ini diperburuk ketika media komunikasi informal, termasuk percakapan digital, digunakan untuk memperkuat kecurigaan daripada membangun pemahaman bersama. Accordingly, konflik horizontal berkembang bukan hanya karena adanya benturan kepentingan, tetapi juga karena hilangnya ruang interaksi yang aman dan terbuka.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa kelompok pemuda sering berada di posisi yang ambivalen. Di satu sisi, mereka dapat menjadi pihak yang paling cepat bereaksi terhadap provokasi atau isu-isu yang menyentuh harga diri kelompok. On the other hand, mereka juga merupakan kelompok yang paling potensial menjadi jembatan komunikasi bila diberi ruang partisipasi dan tanggung jawab sosial. Dalam beberapa kasus, ketegangan awal justru diperkeras oleh solidaritas sempit antar kelompok yang lebih menekankan pembelaan identitas dibanding penyelesaian masalah. Hal ini menunjukkan bahwa kewargaan di tingkat lokal sangat berkaitan dengan bagaimana identitas kelompok dinegosiasikan dalam ruang publik sehari-hari.

Selain itu, temuan menunjukkan bahwa konflik horizontal tidak selalu berakar pada perbedaan ideologis atau identitas yang besar. Banyak ketegangan justru tumbuh dari

persoalan sosial yang lebih dekat, seperti rasa tidak dihargai, kecemburuan terhadap akses pengaruh lokal, atau kekecewaan terhadap cara keputusan diambil dalam lingkungan warga. Based on temuan ini, konflik horizontal dapat dibaca sebagai gejala dari lemahnya pengakuan sosial dan partisipasi yang inklusif. Ketika sebagian warga merasa tidak didengar atau diperlakukan tidak adil, maka potensi benturan meningkat. Dengan demikian, pencegahan konflik tidak cukup dilakukan setelah benturan terjadi, tetapi harus dimulai dari penguatan komunikasi dan rasa keadilan dalam kehidupan komunitas sehari-hari.

## **2. Praktik Kewargaan dalam Meredam dan Mengelola Konflik**

Temuan kedua menunjukkan bahwa praktik kewargaan memainkan peran yang sangat penting dalam meredam konflik horizontal. Ketika ketegangan mulai meningkat, aktor-aktor lokal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus lingkungan, dan perwakilan pemuda berupaya membuka ruang dialog agar situasi tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka. Through musyawarah, kunjungan antar pihak, mediasi informal, dan pertemuan terbatas, mereka berusaha memulihkan komunikasi yang terputus. Praktik-praktik semacam ini memperlihatkan bahwa kewargaan dalam konteks konflik bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga kesediaan warga untuk aktif menjaga ruang bersama dari kerusakan sosial. Temuan ini sejalan dengan pendekatan peacebuilding yang menekankan pentingnya aktor lokal dalam transformasi konflik (Lederach, 1997).

Dalam banyak kasus, dialog menjadi pintu awal yang paling menentukan. Informan menegaskan bahwa setelah fase emosi mereda, pertemuan langsung antar pihak membuka peluang untuk menjelaskan kesalahpahaman dan menurunkan ketegangan. In this context, kehadiran pihak ketiga yang dianggap netral sangat membantu. Tokoh lokal yang dipercaya tidak hanya memfasilitasi percakapan, tetapi juga menjaga agar pertemuan tidak berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Thus, keberhasilan mediasi lokal sangat bergantung pada tingkat legitimasi sosial mediator dan kemampuan mereka membangun rasa aman dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kewargaan juga membutuhkan modal sosial berupa kepercayaan terhadap figur dan lembaga lokal.

Selain dialog, kegiatan bersama menjadi mekanisme penting dalam membangun kembali hubungan sosial. Beberapa informan menjelaskan bahwa setelah konflik mereda, masyarakat mengadakan kerja bakti, forum pemuda, kegiatan keagamaan bersama, atau pertemuan rutin yang melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan. Based on pengalaman ini, interaksi praktis lebih efektif dalam memulihkan hubungan daripada sekadar pernyataan damai yang bersifat formal. Through kegiatan bersama, warga kembali melihat satu sama lain bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kepentingan bersama. Dalam kajian citizenship, proses ini penting karena memperlihatkan bahwa kewargaan bertumbuh melalui keterlibatan yang berulang dalam ruang sosial yang dibagi bersama (Isin & Nielsen, 2008; Putnam, 2000). Berikut ini ringkasan temuan utama penelitian.

**Tabel 1. Ringkasan Dinamika Konflik Horizontal dan Praktik Kewargaan di Jawa Tengah**

<b>Dimensi</b>	<b>Temuan Lapangan</b>	<b>Makna Kewargaan</b>
Sumber konflik	Ketidakpercayaan, miskomunikasi, persaingan pengaruh lokal	Konflik muncul dari rapuhnya relasi sosial
Pemicu eskalasi	Rumor, solidaritas sempit, emosional kelompok	Kewargaan melemah saat dialog terputus
Mekanisme peredaaan	Musyawarah, mediasi, kunjungan antar pihak, forum warga	Warga aktif menjaga ruang hidup bersama
Pemulihan relasi	Kegiatan bersama, forum kerja kolektif	Kewargaan dipraktikkan melalui rekonsiliasi
Faktor keberlanjutan	Kepemimpinan inklusif, komunikasi rutin, kepercayaan sosial	Perdamaian memerlukan institusi lokal yang hidup

Tabel di atas memperlihatkan bahwa konflik horizontal tidak dapat dipisahkan dari kualitas relasi kewargaan di tingkat komunitas. Based on data wawancara, wilayah yang memiliki tradisi musyawarah aktif dan figur lokal yang dipercaya cenderung lebih cepat memulihkan ketegangan. On the other hand, wilayah yang komunikasi sosialnya telah terfragmentasi membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kembali rasa aman dan saling percaya. Dengan demikian, resolusi konflik sangat terkait dengan kapasitas warga untuk menghidupkan mekanisme partisipasi dan pengakuan bersama.

Temuan lain menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam dua arah: sebagai sumber kerentanan sekaligus agen perdamaian. Ketika pemuda hanya bergerak dalam solidaritas kelompok sempit, mereka mudah menjadi perpanjangan konflik. Namun, ketika mereka dilibatkan dalam forum lintas kelompok, program sosial bersama, dan inisiatif komunikasi lingkungan, mereka justru menjadi aktor yang efektif dalam meredam prasangka. Accordingly, penguatan kewargaan pemuda menjadi sangat penting dalam strategi pencegahan konflik horizontal. Hal ini menegaskan bahwa perdamaian lokal tidak cukup bergantung pada elite atau aparat, tetapi harus ditopang oleh generasi warga yang mampu mengelola perbedaan secara demokratis.

### **3. Tantangan Menjaga Perdamaian dan Kohesi Sosial secara Berkelanjutan**

Temuan ketiga menunjukkan bahwa perdamaian setelah konflik tidak otomatis bertahan hanya karena benturan telah berhenti. Banyak informan menegaskan bahwa ketegangan dapat muncul kembali apabila komunikasi tidak dijaga, luka sosial tidak dipulihkan, dan prasangka lama tidak dibongkar secara terbuka. In this context, penghentian konflik hanyalah tahap awal, sementara pemeliharaan perdamaian memerlukan usaha yang lebih panjang dan konsisten. Temuan ini mendukung pandangan bahwa resolusi konflik yang berkelanjutan harus menyentuh dimensi relasi sosial, bukan sekadar pengendalian situasi sesaat (Lederach, 1997).

Salah satu tantangan utama adalah memulihkan kepercayaan. Setelah konflik, warga sering masih menyimpan kehati-hatian dalam berinteraksi. Mereka mungkin bersedia

hadir dalam forum bersama, tetapi belum sepenuhnya merasa aman untuk menjalin kedekatan sosial. Based on kondisi ini, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan seruan moral, melainkan melalui interaksi yang berulang, adil, dan terbuka. Kegiatan bersama, komunikasi rutin, dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan menjadi sangat penting untuk menciptakan pengalaman baru yang lebih positif. Thus, kohesi sosial pascakonflik harus dikerjakan sebagai proses sosial, bukan diasumsikan muncul dengan sendirinya.

Tantangan berikutnya adalah keberlanjutan kelembagaan lokal. Dalam beberapa kasus, forum mediasi atau komunikasi hanya aktif ketika konflik sedang memuncak, tetapi melemah setelah situasi dinilai normal. On the other hand, informan menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki forum warga rutin, pertemuan lintas kelompok, atau kepengurusan lingkungan yang responsif cenderung lebih siap menghadapi potensi ketegangan berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kewargaan yang kuat memerlukan institusi sosial lokal yang hidup dan berfungsi. Dalam bahasa citizenship, perdamaian tidak cukup dijaga oleh niat baik individu, tetapi perlu ditopang oleh struktur partisipasi yang berkelanjutan (Chan et al., 2006; Putnam, 2000).

Aspek lain yang penting adalah peran kepemimpinan inklusif. Tokoh lokal yang dipercaya semua pihak menjadi penentu dalam menjaga komunikasi dan mencegah tumbuhnya kembali polarisasi. Ketika pemimpin lingkungan berpihak secara sempit atau gagal membuka ruang dialog, ketegangan lama lebih mudah hidup kembali. Accordingly, kepemimpinan dalam konteks konflik horizontal bukan hanya persoalan otoritas formal, tetapi juga kemampuan menjadi penengah yang adil dan dipercaya. Dalam hal ini, kualitas kepemimpinan lokal merupakan bagian integral dari kualitas kewargaan kolektif.

Berdasarkan keseluruhan temuan, artikel ini mengidentifikasi empat poin utama. Pertama, konflik horizontal di Jawa Tengah tumbuh dari akumulasi ketidakpercayaan, komunikasi yang putus, dan kompetisi pengaruh lokal. Kedua, praktik kewargaan menjadi kunci peredaan konflik melalui musyawarah, mediasi, dan pembukaan kembali ruang dialog. Ketiga, rekonsiliasi sosial lebih kuat ketika diikuti kegiatan bersama yang menciptakan pengalaman kolektif baru antar pihak yang sebelumnya berkonflik. Keempat, perdamaian yang berkelanjutan sangat bergantung pada kepercayaan sosial, kepemimpinan inklusif, forum komunikasi lokal, dan pelibatan pemuda secara konstruktif. Based on temuan ini, konflik horizontal dapat dibaca sebagai arena tempat kualitas kewargaan diuji secara nyata.

Dalam konteks kajian Journal of Citizenship, artikel ini memperluas pemahaman bahwa kewargaan tidak hanya berkaitan dengan hak, kewajiban, dan partisipasi formal, tetapi juga dengan kemampuan warga mengelola ketegangan sosial tanpa jatuh pada kekerasan. Konflik horizontal menunjukkan bahwa hidup bersama dalam masyarakat majemuk memerlukan kapasitas dialog, pengakuan, dan tanggung jawab kolektif yang terus dipelihara. Accordingly, citizenship di tingkat lokal harus dipahami sebagai praktik

sosial yang menjaga kohesi, membuka ruang komunikasi, dan membangun kembali kepercayaan ketika relasi sosial mengalami keretakan.

### **Kesimpulan**

Artikel ini menyimpulkan bahwa konflik horizontal di Jawa Tengah bukan semata-mata benturan sesaat antarwarga, tetapi merupakan gejala dari relasi sosial yang rapuh akibat akumulasi ketidakpercayaan, miskomunikasi, dan kompetisi pengaruh di tingkat lokal. Based on temuan penelitian, praktik kewargaan memiliki peran sentral dalam mencegah eskalasi dan memulihkan hubungan sosial melalui dialog, mediasi, kegiatan bersama, dan keterlibatan aktor-aktor lokal yang dipercaya. Dengan demikian, kewargaan dalam konteks konflik harus dipahami sebagai kapasitas warga untuk menjaga kemungkinan hidup bersama di tengah perbedaan dan ketegangan, bukan hanya sebagai keanggotaan formal dalam negara.

Accordingly, kontribusi artikel ini terletak pada penegasan bahwa resolusi konflik horizontal merupakan bagian penting dari praktik citizenship di tingkat komunitas. Untuk memperkuat perdamaian sosial secara berkelanjutan, diperlukan pendidikan kewargaan yang menekankan dialog dan pengelolaan perbedaan, forum komunikasi lintas kelompok yang rutin, pelibatan pemuda dalam program kolaboratif, serta penguatan kepemimpinan lokal yang inklusif dan dipercaya. Dengan langkah-langkah tersebut, kewargaan tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi berkembang menjadi kapasitas kolektif masyarakat untuk merawat kohesi sosial dan mencegah kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Referensi**

- Barron, P., Diprose, R., & Woolcock, M. (2009). *Contesting development: Participatory projects and local conflict dynamics in Indonesia*. Yale University Press.
- Chan, J., To, H. P., & Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. *Social Indicators Research*, 75(2), 273–302.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Gurr, T. R. (1970). *Why men rebel*. Princeton University Press.
- Isin, E. F., & Nielsen, G. M. (2008). *Acts of citizenship*. Zed Books.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.